



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru  
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : [admin@dishub.banjarbarukota.go.id](mailto:admin@dishub.banjarbarukota.go.id)

### LAPORAN REVISI KEBIJAKAN YANG TIDAK HARMONIS/TIDAK SINKRON/BERSIFAT MENGHAMBAT PELAKSANAAN URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Berdasarkan telaahan terhadap produk hukum yang terkait dengan pelaksanaan urusan bidang perhubungan baik, dari berbagai produk hukum sebagaimana ketentuan yang terkait dengan peraturan perundangan, telah dilakukan analisa secara bersama oleh tim yang telah dibentuk sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan. Pelaksanaan analisa terhadap produk hukum tersebut agar dalam pelaksanaan pelayanan didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, oleh karena itu pentingnya kepastian hukum, namun adanya berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh berbagai sumber yang berbeda mengakibatkan adanya ketidakharmonisan dan juga ketidak sinkronan antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka pelaksanaan bidang perhubungan diperlukan kepastian hukum untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan oleh karena itu diperlukan produk hukum daerah terencana, terpadu, sistematis, dan tertib.

Oleh karena pentingnya pelaksanaan deregulasi kebijakan yang terkait dengan bidang perhubungan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/ kebijakan yang sifatnya menghambat, terutama untuk menghindari tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Untuk itu Tim Penataan Produk Hukum Dinas Perhubungan telah melaksanakan beberapa hal berikut ini:

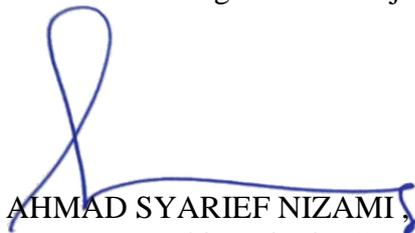
- a. Mengidentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
- b. Mengusulkan untuk revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat.

Setelah tim Penataan Produk Hukum Dinas Perhubungan bekerja, dengan melakukan telaahan dan analisa yang mendalam terhadap berbagai peraturan yang ada terdapat peraturan yang harus segera di revisi dan hal tersebut telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan telah ditindak lanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan penggantinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 21 Desember 2021

Ketua Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru,



AHMAD SYARIEF NIZAMI, SSTP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780921 199612 1 001

**DAFTAR KEBIJAKAN YANG TIDAK HARMONIS/TIDAK SINKRON/BERSIFAT MENGHAMBAT PELAKSANAAN  
URUSAN BIDANGPERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

NO	PRODUK HUKUM	JENIS	TAHUN	STATUS	ANALISA	REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);	Peraturan Daerah	2011	Berlaku	-	-	-
2.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);	Peraturan Daerah	2011	Berlaku	-	-	-
3.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);	Peraturan Daerah	2011	Berlaku	-	-	-
4.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);	Peraturan Daerah	2011	Berlaku	-	-	-
5.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);	Peraturan Daerah	2016	Berlaku	Sejak dikeluarkan peraturan tersebut belum ada perubahan tarif;	Perlunya penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan	Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

NO	PRODUK HUKUM	JENIS	TAHUN	STATUS	ANALISA	REKOMENDASI	KETERANGAN
6.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);	Peraturan Daerah	2016	Berlaku Sebagian pasal telah di rubah			
7.	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);	Peraturan Daerah	2019	Berlaku	Belum diaturnya kerjasama pengelolaan perparkiran dengan pihak lain sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perparkiran	perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama Dengan Orang atau Badan Hukum	Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama Dengan Orang Atau Badan Hukum
8.	Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 30);	Peraturan Walikota	2016	Berlaku	-	-	-
9.	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);	Peraturan Walikota	2016	Berlaku	-	-	-

NO	PRODUK HUKUM	JENIS	TAHUN	STATUS	ANALISA	REKOMENDASI	KETERANGAN
10.	Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Pelaksana Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 21)	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
11.	Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Dan Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 32)	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
12.	Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 35);	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
13.	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
14.	Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 70);	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
15.	Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84);	Peraturan Walikota	2017	Berlaku	-	-	-
16.	Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Dan Insentif	Peraturan Walikota	2020	Berlaku	-	-	-

NO	PRODUK HUKUM	JENIS	TAHUN	STATUS	ANALISA	REKOMENDASI	KETERANGAN
	Petugas Parkir (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 46);						
17.	Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 60)	Peraturan Walikota	2020	Berlaku	-	-	-
18.	Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 75);	Peraturan Walikota	2020	Berlaku	-	-	-
19.	Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/241/Kum/2017 Penetapan Rute Operasional Angkutan Pelajar Dan Angkutan Kesehatan	Keputusan Walikota	2020	Berlaku	-	-	-